KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KMP tawarkan kursi pimpinan komisi ke KIH
Tanggal : Selasa, 04 November 2014
Surat Kabar : Suara Karya
Halaman : 1 dan 15

PARLEMEN

KMP Tawarkan Kursi Pimpinan Komisi ke KIH

JAKARTA (Suara Karya): Koalisi Merah Putih (KMP) bersedia bermusyawarah dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). KMP menawarkan penambahan tiga komisi, bahkan bersedia menyerahkan beberapa kursi pimpinan komisi ke KIH.

"Kalau mau, tiga komisi baru bisa ditambah, itu di luar dari sebelas komisi yang sudah ditetapkan. Misalnya, Komisi I itu mengurusi bidang pertahanan dan maritim. Saya usulkan maritim fokus jadi komisi sendiri karena maritim ini jadi visi besar Jokowi," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah, usai rapat pimpinan pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR, di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).

Dengan demikian, bisa dibentuk Komisi XII yang membidangi masalah maritim dengan mitra kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Dewan Maritim Nasional. "Kemudian riset dan teknologi bisa jadi satu komisi," katanya merujuk Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam diskusi di Bamus, kementerian ini paling banyak mendapat perhatian karena diletakkan di Komisi VII yang membidangi energi dan riset. Padahal, pendidikan tinggi masih bidang Komisi X yang membidangi pendidikan.

Jika terpisah sebagai mitra kerja sendiri di DPR, maka dibentuk Komisi XII yang membidangi masalah riset dan teknologi dengan mitra Kemenristekdikti, dengan catatan dikti Komisi X.

"Kemudian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bisa jadi satu komisi supaya terintegriasi dengan semangat pemberantasan korupsi terkait pencegahan. Bagus ini kalau disepakati," kata Fahri. Maka, tutur dia, Kemen PAN-RB menjadi Komisi XIII.

Fahri mengatakan, penambahan komisi itu dimungkinkan dan bisa disahkan rapat paripurna hingga diisi anggota-anggota KIH, namun dengan syarat KIH hadir dulu di paripurna untuk ikut membahas. "Berharap besok mereka bisa daftarkan nama-nama (anggota fraksi), setelah itu kita bahas. Kan ada kemungkinan menambah jumlah komisi, mereka bisa masuk lagi," ucap Wakil Sekjen DPP PKS ini.

LANJUTAN:
KMP Tawarkan ... Hal 15

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DARI HALAMAN 1

KMP Tawarkan Kursi Pimpinan Komisi ke KIH

Sebelumnya, pimpinan DPR dan Fraksi minus anggota KIH telah menyepakati mitra kerja untuk 11 komisi. Semua kementerian telah disahkan mitranya di komisi, termasuk nomenklatur baru.

Politikus Partai Gerindra Eddy Prabowo menegaskan, dirinya rela melapaskan jabatan sebagai ketua Komisi IV DPR. "Mohon catat, kalau cuma cari jabatan, saya rela diganti sebagai pimpinan Komisi IV demi Indonesia," katanya, di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/11).

Menurut dia, apa yang terjadi di DPR adalah dinamika politik. Menurut dia, posisi KIH saat ini tidak memenangkan permainan politik. Hal yang sama juga dialami KMP untuk DPRD di beberapa wilayah, misalnya di Bali dan Jawa Tengah.

Eddy melanjutkan, di wilayah itu KMP juga tidak mempermasalahkan kalau demi Indonesia. Tetapi, kejadian "sapu bersih" KIH di Bali dan Jateng tidak diangkat kasusnya seperti di DPR.

Eddy menambahkan, persoalan yang sebenarnya terjadi terkait kisruh pimpinan ini adalah KIH sebelumnya hanya minta 10 posisi pimpinan, dan KMP bersedia membahasnya.

Namun, setelah itu KIH meminta tambahan lagi menjadi 16 pimpinan. "Bagaimana ini? Kita sudah setuju untuk membahas permintaan 10 posisi, namun mereka minta 16, jangan-jangan kalau disetujui 16 nanti mereka minta tambahan lagi," katanya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini kekisruhan di DPR dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu, dengan peran serta MPR.

"Soal kisruh DPR, MPR akan membantu, dan yakinlah mudah-mudahan sebelum dua minggu sudah selesai," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/11).

Zulkifli mengatakan, tidak ada masalah di suatu negara yang tidak bisa diselesaikan melalui silaturahmi dan mufakat. Menurut dia, terkait kekisruhan di DPR, para ketua umum partai politik sedang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Apabila menyangkut kepentingan bangsa dan semua pihak, pimpinan kita akan bijak," ujarnya. Dia menambahkan, bila hal itu berhasil, maka tidak ada istilah pihak yang kalah, namun semua pihak akan menang.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah berharap, pimpinan MPR berperan dalam mendamaikan kekisruhan yang terjadi di lembaga DPR.

"Terkait kekisruhan, pimpinan MPR harus keluar dari pemikiran normatif, dan saya mengimbau untuk segera menggunakan Pasal 28 Tatib MPR ayat (1), yaitu pimpinan MPR berwenang mengadakan rapat konsultasi dengan presiden," kata Basarah, di gedung MPR, Jakarta, Senin (3/11).

Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah dalam diskusi bertajuk "Peran MPR ke Depan", di gedung MPR, Jakarta. Basarah mengatakan, karena terjadi kekeliruan praktik demokrasi, seharusnya pimpinan MPR melakukan inisiatif mengundang presiden, pimpinan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Yudisial (KY) untuk duduk bersama, dan kembali ke Pancasila.

Menurut dia, dengan peran itu, MPR bisa menempatkan dirinya sebagai Brahmana. "Saya rasa ini prakarsa yang baik, atas perintah Pasal 28 Tatib MPR, karena itu MPR tidak lagi melaksanakan fungsi normatif, tetapi juga fungsi lainnya," ujar Basarah.

Basarah, yang juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal PDIP ini, mengatakan, MPR harus hadir di saat konflik, dan negara diwakili MPR harus hadir.

Soal penambahan tiga komisi, Ahmad Basarah menyambut baik, namun ia tak serta-merta menyatakan menerima. "Sudah ada keinginan dari KMP mencari titik temu bermusyawarah, kita hormati semangat itu, meskipun bisa saja saya tidak bersetuju," katanya.

(Kartoyo DS/Rully)